



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAJJUL KAMIL
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 525152

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 578.120.000

1. Tanah Seluas 225 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 123.750.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
3. Tanah Seluas 454 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 158.900.000
4. Tanah Seluas 826 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, WARISAN Rp. 173.460.000
5. Tanah Seluas 366 m2 di KAB / KOTA ACEH TIMUR, WARISAN Rp. 86.010.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 193.500.000

1. MOBIL, NISSAN JUKE MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP RA A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 23.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 81.081.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.764.944**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 856.465.944



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 856.465.944

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.